

RADIKALISME DI ASIA TENGGARA:

Dinamika Relasi Agama, Konflik, dan Kebijakan Publik

Bayu Mitra Adhyatma Kusuma

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: bayumitraa.kusuma@yahoo.com

Disampaikan di Kuliah Umum Prodi Ilmu Administrasi Publik

Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta

Jakarta, 15 November 2016

A B S T R A K

Radikalisme telah menjadi problem sensitif yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di Asia Tenggara. Salah satu faktor pemicu munculnya radikalisme adalah pemahaman agama dengan cara ekstrem, yang selanjutnya memunculkan anggapan bahwa pihak lain yang tak sepemahaman adalah salah dan kekerasan merupakan cara yang sah untuk mengubah keadaan tersebut. Kondisi ini kerap terjadi karena manusia diciptakan memiliki rasa cinta terhadap garis keturunan atau golongan dan naluri agresif dari *animal power* dalam diri. Pemahaman ekstrem tersebut mengakibatkan munculnya konflik bernuansa agama, dimana dalam realitanya konflik agama di Asia Tenggara kerap dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh rezim penguasa. Oleh karena itu kajian ini melihat kebijakan publik dari dua perspektif, yaitu sebagai pemicu konflik agama dan sebagai resolusi konflik agama, dengan menekankan studi komparasi tentang radikalisme di Filipina, Thailand, dan Indonesia.

Kata Kunci: Radikalisme, Asia Tenggara, Agama, Konflik, Kebijakan Publik

A. PENDAHULUAN

Radikalisme adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; atau sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisme memiliki tiga dimensi yang sangat mendasar. Pertama, anggapan seseorang atau sekelompok orang bahwa paham yang dianut adalah yang paling benar. Kedua, anggapan bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mengubah keadaan. Dan ketiga, adanya usaha aktif untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat secara radikal atau drastis. Dalam hal ini seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang berpaham radikal jika mendorong orang lain atau bahkan secara langsung aktif mendukung terjadinya perubahan radikal yang akan mengancam tatanan dalam masyarakat.

Pada umumnya radikalisme muncul sebagai akibat dari paham ekstrem yang disebabkan ketidakpuasan atas suatu keadaan. Maraknya gerakan radikalisme atau kemunculan kelompok-kelompok yang "dituduh" sebagai teroris akhir-akhir ini dalam salah satu perspektif dapat dijelaskan sebagai respon atas kegagalan dari modernisme, liberalisme, dan demokrasi bahkan filsafat dalam menjelaskan berbagai krisis masyarakat modern (Affandi, 2004:4). Terlebih kegagalan paradigma tersebut tidak diikuti oleh tersedianya paradigma alternatif yang mampu menjawab krisis tersebut. Akibatnya masyarakat mencari alternatif sendiri dengan cara dan pemahaman yang salah. Radikalisme memang tidak secara otomatis selalu berhubungan dengan terorisme. Namun radikalisme adalah fondasi dari maraknya aksi terorisme.

Hal tersebut makin menambah kompleks persoalan di masyarakat yang penuh akan pertikaian dan permasalahan sosial lainnya. Sebagaimana

dijelaskan oleh Ibn Khaldun dalam karya fenomenalnya – *Muqaddimah* – bahwa manusia memiliki watak agresif sebagai akibat dari adanya *animal power* dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan. Lebih dari itu, sebagian orang memiliki pandangan akan pentingnya “menyerang sebelum diserang”. Itulah yang kemudian menjadi landasar Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush Jr. ketika melakukan invasi kepada Irak ataupun negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Invasi tersebut dilakukan pemerintahan Bush dengan mengatasnamakan kampanye anti radikalisme dan terorisme. Meskipun disinyalir adanya agenda lain yang bersifat ekonomis dalam invasi militer tersebut.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa gerakan radikalisme juga berdampak kepada citra agama-agama. Hal tersebut terjadi karena banyak dari pelaku radikalisme tersebut yang menggunakan atribut dan jargon-jargon keagamaan. Akibatnya muncul kesan-kesan negatif dan mendiskreditkan agama tertentu. Oleh karena itu istilah seperti *Jewish militant*, *Muslim fundamentalist*, atau *Christian coalition* telah masuk dalam wacana politik internasional dengan konotasi negatif (Ahmad, 2001:90). Berpijak pada fenomena tersebut maka isu radikalisme menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih dalam perkembangannya isu-isu radikalisme tidak hanya berkembang di Timur Tengah, tapi juga berkembang pesat di Asia Tenggara. Secara nyata, Bom Bali atau *Bali Blast* adalah salah satu bukti besar sekaligus menjadi alarm yang menyala keras bahwa radikalisme telah menjangkiti kawasan Asia Tenggara.

B. GAMBARAN UMUM RADIKALISME DI ASIA TENGGARA

Jika melihat konteks historisnya, ancaman ekstrimisme dan radikalisme yang berujung pada aksi-aksi teror mulai mendapat tanggapan besar dari ASEAN pasca peristiwa 11 September di Amerika Serikat dan bom Bali 12 Oktober (Emmers, 2003). Di kawasan Asia Tenggara, pada umumnya radikalisme dipengaruhi oleh relasi mayoritas-minoritas dan heterogenitas, baik ditinjau dari suku, ras, maupun agama. Kita dapat melihat tingginya angka radikalisme di Indonesia, Thailand, dan Filipina misalnya. Di Indonesia, setelah rezim Orde Baru runtuh, gerakan-gerakan radikal di Indonesia berani bermunculan bak cendawan di musim hujan dan dilakukan secara terang-terangan setelah sebelumnya bergerak di bawah tanah. Selanjutnya radikalisme menjadi isu yang semakin populer setelah terjadinya tragedi Bom Bali I pada tahun 2002 yang menewaskan sekitar 202 jiwa. Kemudian disusul dengan ledakan bom di hotel JW Marriot, Kedutaan Besar Australia, sampai dengan yang terjadi di kawasan Sarinah beberapa waktu lalu. Hingga pada waktu itu muncul *joke* yang berkembang di masyarakat bahwa para pelaku salah mendengar instruksi dari pimpinannya, bukaanya ke Suriah malah ke Sarinah. Sejak merebaknya isu radikalisme dan terorisme di Indonesia, perburuan teroris terus digalakkan dan pengawasan terhadap ormas-ormas yang dianggap berhaluan radikal semakin diperketat. Namun hasilnya hingga kini, jaringan terorisme dan kelompok-kelompok radikal masih belum dapat diberangus habis. TNI dan Polri pun dibuat kerepotan. Contoh terbaru adalah Operasi Tinombala yang ditujukan untuk memberantas kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Meskipun sang pemimpin Santoso telah tertembak mati, namun bibit-bibit penggantinya terus bermunculan.

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Thailand dan Filipina, khususnya di wilayah selatan kedua negara tersebut. Di Thailand selatan,

hingga kini masih sering terdengar berita tentang ledakan bom mobil serta kekerasan yang melibatkan tentara dan penduduk setempat (Kusuma, 2015:37). Meski terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah Thailand dan masyarakat setempat, secara umum kelompok yang dituding melakukan aksi-aksi radikal adalah Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan *Pattani United Liberation Organization* (PULO). Adapun di Filipina selatan, kelompok-kelompok radikal yang bercokol adalah *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan Abu Sayyaf. Bahkan untuk kasus Abu Sayyaf kini telah menjadi perhatian tiga negara meliputi Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Hal ini selain karena wilayah operasi kelompok Abu Sayyaf berada di perbatasan perairan ketiga negara, Abu Sayyaf juga telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin tertinggi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Lalu bagaimana dengan Malaysia? Secara umum radikalisme di Malaysia relatif kurang nampak di permukaan, namun ternyata di Sarawak Malaysia telah menjadi markas bagi kelompok Daulah Islam Nusantara (DIN) yang bertekad menyatukan Sarawak, Sabah, Filipina Selatan, Kalimantan dan Sulawesi. Lebih dari itu, di Malaysia sendiri jumlah warga negara yang direkrut ISIS sekitar 40 dan di Filipina sekitar 200 (Hashim, 2015). Ditemukan pula fakta bahwa Malaysia menjadi negara “eksportir” tokoh-tokoh radikal. Aksi Noordin Mohd Top dan Azahari Husin di Indonesia merupakan bukti sah pengaruh Malaysia terhadap radikalisme di Asia Tenggara. Belum lagi banyaknya orang Malaysia yang menjadi pelatih camp-camp militan di Filipina Selatan. Sedangkan di negara dengan penduduk yang relatif homogen seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja dan Laos, radikalisme relatif dapat diminimalisasi. Begitu pula di Singapura, hampir tidak ada berita tentang radikalisme. Hanya saja masyarakat Singapura memang telah terkotak-kotakkan oleh etnis yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Adapun di Myanmar

hingga kini masih berkebutakan pada permasalahan kekerasan pada etnis Rohingya. Sebenarnya jika berpijak pada konsep masyarakat ASEAN yang di dalamnya terdiri dari tiga unsur yang salah satunya adalah *political-security community*, maka kestabilan Asia Tenggara semestinya tidak hanya menjadi tanggungjawab masing-masing negara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara semestinya bekerjasama dalam menangani masalah-masalah keamanan regional, termasuk di dalamnya adalah radikalisme.

C. AGAMA, KONFLIK, DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa radikalisme secara bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun bila dilihat dari sudut pandang agama, radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat fundamental disertai dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Akibatnya tidak jarang penganut dari suatu paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham untuk mengaktualisasikan secara paksa paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya.

Kekerasan yang mengatasnamakan agama atau keyakinan sering dikaitkan ke dalam isu radikalisme yang selanjutnya berujung pada terorisme, terutama semenjak dicetuskannya program *Global War on Terror* (GWOt) oleh Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001 yang menimpa gedung *World Trade Center*. Namun ternyata GWOt menimbulkan efek negatif dengan meningkatnya fenomena Islamofobia, terutama di kalangan masyarakat Amerika dan Eropa. Islamofobia merupakan istilah kontroversial yang kerap diasosiasikan pada prasangka dan diskriminasi kepada umat Muslim (Kusuma, 2016:188). Hasan (2008:12) menyebutnya bahwa kondisi tersebut memicu munculnya anti-Amerikanisme, Sikap ini ditunjukkan oleh kelompok-

kelompok berhaluan radikal fundamentalis sekaligus sebagai balasan atas sikap antifundamentalisme yang ditunjukkan oleh Amerika dan sekutunya. Pernyataan Bush "*you are either with us or with terrorists*" tidak memberi pilihan lain bagi kelompok ini kecuali mengambil pilihan kedua.

Label kekerasan yang melekat menciptakan pandangan atau asumsi bahwa antara radikalisme dan terorisme, khususnya yang mengatasnamakan agama, memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun dalam hal ini penulis merasa ada satu hal primer yang harus diluruskan, yaitu mengenai istilah Islam radikal. Dalam pemahaman penulis, istilah Islam radikal kurang dapat diterima. Ini karena Islam diturunkan ke dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin* atau rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya ayat 107 yang artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Penulis berpandangan bahwa istilah yang lebih tepat adalah Muslim radikal. Hal ini karena penekanan istilah radikal bukan pada Islam sebagai agama, melainkan Muslim sebagai pribadi yang menjalankan ajaran Islam dengan caranya masing-masing. Dan cara masing-masing tersebutlah yang kemudian dijalankan secara radikal hingga memicu munculnya suatu konflik di suatu wilayah. Hal tersebut pada dasarnya sangat kontradiktif dengan masuknya Islam di bumi Nusantara dimana Islam masuk melalui cara-cara damai. Meminjam istilah Sunan Kalijaga dalam *suluk lokajaya*, masuknya Islam ke Nusantara dapat digambarkan dengan kalimat *anglaras ilining banyu, ngeli nanging aja keli* (menyesuaikan diri seperti aliran air, menghanyutkan diri tetapi tidak terbawa hanyut). Dengan cara yang adaptif dan luwes tersebut, Islam di Nusantara berkembang tanpa menimbulkan banyak konflik.

Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977:11) mengemukakan bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai

keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara pihak atau lebih secara berterusan. Galtung (2003;160) menambahkan bahwa konflik adalah konstruksi segitiga dari asumsi + perilaku + kontradiksi. Artinya konflik dipicu oleh asumsi seseorang atau sekelompok orang yang kemudian mempengaruhi perilakunya, dimana perilaku tersebut kontradiktif, tidak sepaham, atau berlawanan dengan pihak yang lain. Konflik dapat muncul karena manusia memiliki dua potensi dalam diri yaitu cinta terhadap (identitas) kelompok dan agresif, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Khaldun yang dikutip oleh Affandi (2004:81-84).

Menurut Ibn Khaldun, fitrah manusia adalah bahwa sejak lahir mereka telah dianugerahi rasa cinta terhadap garis keturunan dan golongan. Rasa cinta ini selanjutnya menimbulkan perasaan harga diri kelompok, kesetiaan, dan rasa senasib sepenanggungan. Disamping itu manusia juga memiliki watak agresif akibat adanya *animal power* terutama saat merasa dalam kondisi terancam sebagaimana telah disinggung di bagian awal. Agresifitas tersebutlah yang selanjutnya memicu konflik baik secara fisik maupun psikologis. Aspek yang masih membedakan dengan hewan adalah bahwa manusia memiliki akal dan pikiran, Pada realitanya, kekerasan atau konflik agama kerap dipengaruhi ataupun mempengaruhi kebijakan publik. Thomas Dye mengemukakan bahwa pengertian dasar kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun dilakukan oleh pemerintah (Tangkilisan, 2003:1). Secara lebih rinci dapat diartikan bahwa dalam konteks kajian ini munculnya konflik agama dipicu oleh kebijakan publik yang dianggap tidak adil atau mendiskriminasi (kebijakan publik sebagai aksi) dan terjadinya konflik agama akan memaksa pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang bertujuan sebagai resolusi konflik baik secara damai maupun represif (kebijakan publik sebagai reaksi).

D. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AKSI DAN REAKSI

Sebagai contoh dari dinamika relasi agama, konflik, dan kebijakan publik maka dalam kajian ini kita akan membahas kasus di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Di Filipina, pada awalnya kaum Muslim lebih memilih jalan damai untuk mendapatkan kedaulatan. Namun dalam perjalanannya, mereka mulai berfikir bahwa perjuangan konstitusional untuk merebut kemerdekaan tidak dapat dilakukan dengan cara damai. Oleh karena itu dipimpin Nur Misuari mereka membentuk *Moro National Liberation Front* (MNLF) untuk mengorganisasi perjuangan mereka melalui jalur bersenjata. Tujuan awal berdirinya MNLF pada mulanya adalah untuk membentuk negara berdaulat. Namun kemudian niat ini berubah ketika pemerintah Filipina memulai negosiasi dengan MNLF pada 1975. MNLF pun mulai melunak, mau berkompromi, hingga akhirnya satu tahun kemudian tercapai kata sepakat tentang kerangka penyelesaian konflik di Filipina selatan.

Kesepakatan ini dikenal dengan Kesepakatan Tripoli yang ditandatangani pada 23 Desember 1976 antara MNLF dan pemerintahan Filipina. Poin utama dari kesepakatan Tripoli adalah MNLF menerima status otonomi untuk wilayah Filipina selatan mencakup tiga belas provinsi, yaitu Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato Utara, Manguindanao, Sultan Kudarat, Lanao Norte, Lanao Sur, Davao Sur, Cotabato Selatan, dan Palawan. Bahkan otonomi penuh di bidang pengadilan dan pendidikan pun diberikan, sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap menjadi wewenang Manila. Namun di lain pihak, kesepakatan Tripoli memicu perpecahan di internal MNLF sendiri. Muncul faksi yang sepakat dan faksi yang menolak kesepakatan Tripoli. Mereka yang menolak kesepakatan Tripoli kemudian membentuk kelompok baru yang disebut dengan MILF, adapun mereka yang lebih ekstrem kemudian membentuk

kelompok Abu Sayyaf. Perlu diketahui bahwa MILF dan Abu Sayyaf adalah kelompok yang bermusuhan karena perbedaan paham.

Parahnya, kesepakatan damai yang ditandatangani di Tripoli ternyata akhirnya dikhianati oleh Ferdinand Marcos sendiri dengan mengadakan referendum di tiga belas provinsi yang tercantum dalam Kesepakatan Tripoli dengan dalih untuk mengetahui apakah penduduk ketiga belas provinsi yang akan diberi otonomi khusus tersebut setuju atau tidak. Namun sebenarnya niatan dari referendum yang dilakukan Marcos tak lebih dari akal-akalan untuk membatalkan Kesepakatan Tripoli secara halus. Karena sebelum referendum dilakukan, Manila sudah terlebih dahulu memindahkan penduduk di Filipina Utara yang mayoritas Katolik secara massif. Sehingga kawasan selatan yang semula lebih banyak penduduk Muslim menjadi didominasi warga Katolik atau Kristen. Kondisi ini tentu bertujuan untuk memastikan hasil referendum yang diharapkan Marcos, yaitu menolak otonomi. Akibatnya, konflik kembali berkobar dan tak kunjung padam hingga kini. Jadi jelaslah konflik agama yang terjadi di Filipina selatan hingga saat ini dipicu oleh kebijakan Manila yang dirasa tak adil oleh masyarakat Muslim di Filipina selatan.

Bertolak ke Kerajaan Thailand, negara yang sedang berkabung menyusul meninggalnya Raja mereka Bhumibol Adulyadej. Kawasan Thailand selatan yang menjadi kantong masyarakat Melayu Muslim meliputi Pattani, Yala, Narathiwat, serta sebagian Songkhla dan Satun adalah sebuah daerah yang rawan konflik dengan latar belakang agama dan etnis. Meletusnya konflik disebabkan Thailand beberapa kali dipimpin oleh rezim yang sangat mendiskriminasi masyarakat Melayu Muslim. Salah satu rezim yang paling diskriminatif bahkan represif adalah Jenderal Phibul Songkhram dimana masyarakat Melayu Muslim telah menjadi mangsa dasar asimilasi kebudayaan (Mahmud, 2004:2). Pada dua periode masa pemerintahan Phibul Songkhram,

kebijakan nasionalisasi budaya Thailand menjadi kebijakan primer negara. Dimulai dari upaya untuk mengasimilasikan bahasa dan budaya Thailand di seluruh penjuru Thailand, termasuk di wilayah selatan yang kemudian menciptakan resistensi dari masyarakat Muslim yang berbahasa Melayu (Kusuma, 2015:11)

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, Muslim di Thailand mendapatkan julukan yang kurang pantas yaitu *khaek* yang berarti orang luar, pendatang atau tamu. Meskipun pada mulanya *khaek* merupakan istilah untuk makro-etnis bagi orang selain Thai tapi lama kelamaan istilah tersebut dipakai pemerintah untuk mendeskripsikan masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan (Aphornsuvan, 2003:5). Pemerintah Thailand dalam hal ini menerapkan kebijakan asimilasi budaya yang sangat mengekang kebebasan hidup masyarakat Muslim Thailand. Secara garis besar inti dari kebijakan tersebut adalah menjadikan Thai Budha sebagai identitas dan kebudayaan tunggal negara. Penerapan kebijakan tersebut juga disertai dengan paksaan, intimidasi, dan ancaman dari pemerintah.

Rezim Thailand lainnya yang juga sangat diskriminatif terhadap Melayu Muslim adalah Thaksin Shinawatra. Meski Raja Thailand sebenarnya telah memerintahkan kepada para birokrat negara untuk menempuh jalur pendekatan kesejahteraan, namun Shinawatra justru memberlakukan kebijakan darurat militer yang diterapkannya sejak 5 Januari 2004. Lebih jauh Shinawatra mencetuskan statemen kontroversial bahwa orang Thailand adalah mereka yang beragama Budha, walaupun tidak beragama Budha mereka harus menggunakan bahasa Thai. Jadi menurutnya apabila seseorang memeluk agama Islam, orang tersebut baru bisa disebut orang Thai hanya jika menggunakan bahasa Thai. Sedangkan apabila seseorang beragama Budha, menggunakan bahasa apapun tetaplah dianggap sebagai orang Thai. Kebijakan

tersebut juga mengakibatkan secara psikologis orang Thai kerap menaruh perasaan curiga terhadap etnis Melayu Muslim.

Konflik di Thailand ini erat kaitannya dengan politik identitas, dimana terjadi benturan pengaruh antar kelompok disebabkan kebijakan diskriminatif yang menimbulkan intoleransi, kekerasan dan konflik etnis. Kondisi pada rezim tersebut di atas kemudian memicu munculnya kelompok-kelompok yang ingin membawa Pattani menjadi negara merdeka seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan *Pattani United Liberation Organization* (PULO). Organisasi-organisasi perlawanan inilah yang kemudian mendapatkan cap radikal dan teroris dari Bangkok. Dari sini kita dapat melihat bahwa munculnya konflik agama dan etnis di Thailand selatan dipicu oleh kebijakan asimilasi budaya dari pemerintah Kerajaan Thailand yang sangat mendiskriminasi hak asasi manusia masyarakat Melayu Muslim dalam beragama dan berbudaya.

Selanjutnya kita pulang ke tanah air kita di Indonesia. Dalam pandangan penulis, radikalisme di Indonesia merupakan kasus radikalisme yang paling unik, rumit, sekaligus menarik untuk dikaji lebih mendalam. Bagaimana tidak, jika radikalisme di Filipina dan Thailand yang berujung pada konflik agama jelas terjadi akibat dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil dan sangat mendiskriminasi kelompok tertentu, maka hal tersebut sebenarnya tak terjadi di Indonesia pasca tumbanganya orde baru dan munculnya reformasi. Kalaupun ada, sebenarnya tidak seserius dan sefatal yang terjadi di Filipina dan Thailand. Namun anehnya radikalisme justru tumbuh subur di era reformasi.

Fenomena radikalisme seringkali dikaitkan dengan isu-isu agama atau etnis, meski sebenarnya radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Di Indonesia, radikalisme makin membesar dan memiliki pendukungnya yang semakin besar pula. Namun di antara gerakan-gerakan radikal tersebut kerap berbeda pandangan

serta tujuan, sehingga memiliki pola dan pergerakan yang berbeda-beda pula. Ada kelompok yang sekedar memperjuangkan penerapan syariat Islam tanpa embel-embel mendirikan negara Islam, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Lebih ekstrem lagi ada pula yang memperjuangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Mulai dari *ideological moral movement* seperti Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia yang memperjuangkan berdirinya khilafah, hingga organisasi yang mengarah pada gaya militeristik nan keras seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, bahkan ada juga yang sampai bergerilya melawan negara dari hutan ke hutan seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Radikalisme yang selanjutnya berujung pada terorisme menjadi masalah sensitif bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Isu tersebut telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan untuk menyebarkan agamanya. Meskipun sebenarnya stigma tersebut mudah dimentahkan, namun fakta di lapangan bahwa pelaku teror di Indonesia mayoritas adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara general. Mengapa dikatakan sebagai “mayoritas”? Pertama, karena memang Islam di Indonesia adalah agama mayoritas. Namun perlu dicatat bahwa dari sebuah agama, tak semua pemeluknya akan menjalankan nilai-nilai ajaran agama tersebut secara benar. Begitupula dalam Islam, ada sebagian pemeluknya yang melenceng dari ajaran Islam. Kedua, karena pada faktanya memang tidak semua tindak radikalisme di Indonesia dilakukan oleh umat Islam. Misalnya kejadian di Tolikara dimana dari jamaah Gereja Injili di Indonesia (GIdI) yang menyerang umat Islam yang sedang shalat Idul Fitri 1436 H dan membakar masjid Baitul Muttaqin serta puluhan kios milik kaum Muslim.

Mencermati maraknya fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia era demokrasi seperti saat ini, memunculkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa radikalisme bisa berkembang begitu pesatnya dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia? Apakah konsep demokrasi yang dibangun di Indonesia saat ini kompatibel dengan kebudayaan dan agama? Pertanyaan tersebut paling tidak menjadi pengingat bagi kita untuk merefleksikan kembali sejauh mana kualitas kehidupan keberagaman kita dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Realitas kekinian menunjukkan bahwa kekerasan, kemiskinan, politik uang, dan korupsi masih mendominasi warna kehidupan di Indonesia. Tragedi penyerangan yang menimpa warga Ahmadiyah, Syiah, dan konflik intra maupun antar agama yang sering terjadi telah menodai harmoni kehidupan multikultural.

Jika kita melihat ke belakang konflik kekerasan yang pernah terjadi lebih kejam berlangsung dalam konflik antar etnis dan antar agama, seperti Pontianak, Sampit, Ambon, dan Poso. Bahkan akhir-akhir ini menguatnya kembali isu terorisme dan radikalisme agama yang ditandai dengan kehadiran gerakan ISIS yang terus merebak di beberapa wilayah di Indonesia dan menciptakan ketidakstabilan kehidupan keberagaman dalam berbangsa dan bernegara. Dan sayangnya pula, sebagian dari kita pun ikut serta mengambil bagian dalam memperkeruh kondisi itu. Keterlibatan tersebut bisa diamati dari tindakan kita secara langsung maupun tidak langsung dalam membangun propaganda yang berdampak pada rasa saling curiga dan kebencian.

Sebagai reaksi dari fenomena tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan baik secara ideologi, politik, dan hukum. Dari aspek ideologi, dilakukan dengan memperkuat substansi Pancasila sebagai ideologi negara serta memperkuat organisasi Islam moderat, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama

Indonesia. Dari aspek politik pemerintah dan DPR harus tegas dalam menghadapi tindakan radikalisme atas nama agama. Sehingga dengan demikian negara hadir secara cepat dan tepat dalam konflik yang bernuansa agama. Dan dari aspek hukum pemerintah memperkuat Undang-Undang (UU) Antiteror dengan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyangkut penalisasi, pemberatan sanksi pidana, perluasan pidana, pidana tambahan, dan penambahan kewenangan pada pemerintah. Selain itu bisa juga dilakukan kriminalisasi atas propaganda yang mengarah pada penyebaran kebencian dan penanaman permusuhan serta kepada siapa pun yang melakukan pelatihan militer yang tak semestinya baik di dalam maupun di luar negeri.

Kembali pada isu konflik agama, harus diakui juga bahwa sebagai langkah resolusi konflik agama, selama ini sering dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis: apakah sepenuhnya penyelesaian diserahkan ke negara untuk bertanggung jawab menanganinya atau diserahkan ke mekanisme sosio-kultural yang hidup di masyarakat setempat. Hal tersebut tecermin dalam diskursus yang berkembang selama ini antara memilih pendekatan resolusi konflik atau pendekatan HAM. Pendekatan resolusi konflik lebih menekankan pentingnya penyelesaian konflik berbasis pendekatan kultural mengingat banyak konflik terjadi tak hanya melibatkan warga sipil sebagai korban, tetapi sekaligus juga sebagai pelaku, seperti terjadi dalam konflik komunal beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan bila menggunakan HAM maka akan langsung dihadapkan pada hukum.

Yang perlu digarisbawahi disini adalah penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil, tanpa memberi kesan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Upaya tersebut misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal, seperti *pela gandong* dalam konflik Ambon. *Pela gandong* adalah

hubungan kekerabatan meski berbeda agama. Dapat pula diartikan hidup bersama dan berdampingan dengan penuh tenggang rasa dalam perbedaan agama dan tidak saling mempengaruhi untuk masuk dan memeluk suatu agama tertentu (Bakri, 2015:52). *Pela gandong* merupakan suatu relasi hubungan darah dan perjanjian antara negeri baik sedaratan dan berlainan pulau, juga antara etnis dan agama yang berbeda. Nilai yang sangat penting disini adalah semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *pela gandong* telah memiliki nilai resolusi konflik. Di daerah lain, masih banyak kearifan lokal sejenis yang harus dikedepankan dalam penyelesaian konflik seperti *sola sungang* di Sulawesi Barat (semua orang bersaudara tanpa membedakan latar belakang penduduk baik asli maupun pendatang), *sipakaleppi* dan *sipakatau* di masyarakat Bugis (saling menghormati dan mengingatkan), *menyama braya* di Bali (semua bersaudara), *ruhui rahayu* di Banjar (kehidupan yang harmonis, sejahtera, aman, dan tenteram), dan masih banyak lagi. Begitu kaya dan adiluhung kearifan lokal di negara kita, dan ini tak boleh kita lupakan.

Memang di level resolusi konflik oleh pemerintah, Indonesia patut berbangga. Sebelum perjanjian Tolikara, Indonesia berulang kali membuat perjanjian damai antar umat beragama seperti Deklarasi Malino yang ditandatangani pasca kerusuhan Poso. Namun jika ke depan pemerintah lebih mengoptimalkan kearifan lokal, maka pemerintah akan menemukan pola resolusi konflik yang relatif paling cocok untuk suatu daerah. Mengingat karakteristik masing-masing daerah hampir pasti berbeda. Dan yang perlu diingat bahwa itu bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan menjadi pekerjaan rumah kita semua.

E. KESIMPULAN

Radikalisme adalah problem serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di Asia Tenggara yang salah satu penyebabnya adalah pemahaman agama dengan cara ekstrem dan memunculkan anggapan bahwa pihak lain yang tak sepemahaman boleh dilawan dengan kekerasan. Pemahaman ekstrem tersebut selanjutnya menyulut konflik bernuansa agama yang dalam realitanya kerap dipengaruhi oleh kebijakan rezim penguasa. Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah penguasa dapat menjadi pemicu konflik agama. Misalnya adalah di Filipina, konflik agama yang terjadi di Filipina selatan hingga saat ini dipicu oleh kebijakan Manila yang dirasa tak adil dan telah melakukan rekayasa referendum yang merugikan masyarakat Muslim di Filipina selatan. Begitu pula di Thailand, munculnya konflik agama dan etnis di Thailand selatan dipicu oleh kebijakan asimilasi budaya dari pemerintah Kerajaan Thailand yang sangat mendiskriminasi hak asasi masyarakat Melayu Muslim dalam beragama dan berbudaya.

Kebijakan publik juga dapat berperan sebagai langkah resolusi konflik agama, misalnya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang multietnik dan multireligius, sehingga konflik tidak mungkin dapat dihindari dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah baik daerah maupun pusat harus selalu menjaga stabilitas keadilan politik, ekonomi dan sosial, sekaligus mampu sebagai fasilitator dalam setiap konflik baik bernuansa etnik maupun agama. Selain itu, semua pihak haruslah menghilangkan rasa prejudice antar pemeluk agama. Memang di level resolusi konflik oleh pemerintah, Indonesia telah berulang kali mampu mewujudkan perjanjian damai seperti Malino dan Tolikara. Namun sangat penting diingat bahwa resolusi konflik harus dilakukan secara adil serta memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal

masyarakat di daerah setempat, dengan tetap berpegang teguh pada bingkai Ke-Indonesiaan. Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hakimul Ikhwan. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Nur. (2001). *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Aphornsuvan, Thanet. (2003). *History and Politics of the Muslim in Thailand*. Bangkok: Thammasat University.
- Bakri, Hendry. (2015). "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon". Dalam *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 1, No. 1*.
- Emmers, Ralf. (2003). "ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia". Dalam *The Pacific Review Vol. 16, No. 3*.
- Galtung, Johan. (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Hasan, Noorhaidi. (2008). *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Hashim, Ahmed S. (2015). *The Impact of the Islamic State in Asia: Policy Report*, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University.
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma. (2016). "Mereduksi Islamofobia Melalui Aksi Nyata Lintas Iman". Dalam Bayu Mitra A. Kusuma dan Zaen Musyirifin (Ed.). *Keberpihakan dan Kepedulian Lintas Iman untuk Difabel*. Yogyakarta: Penerbit Interfidei.

- _____ dan Theresia Octastefani. (2016). "Pattani United Liberation Organization: From Jihad to Local Politics Movement". Dalam *The Indonesian Journal of Public Administration Vol. 2, No. 1*.
- _____. (2015). *Dialectics of Islam, Politics and Government in Southeast Asian Countries: A Comparison of Indonesia and Thailand*. Disampaikan di 6th Joint International Conference and Graduate Workshop on Islamic Studies Revisited: New Trends in the Study of Islam and Muslim Societies. Yogyakarta, 27-30 Oktober.
- Mahmud, Nik Anuar Nik. (2004). *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1885-1954*. Negeri Sembilan: Saremban.
- Newstorm, John W. dan Keith E. Davis. (1977). *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. Singapore: McGraw-Hill.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Ofset.

Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta peneliti di Institute of Southeast Asian Islam (ISAI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alumnus Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang dan Ilmu Politik Burapha University, Thailand.